



Ketahanan Sosial dan Konflik Laten dalam Pelaksanaan PSN di Merauke: Perspektif Politik Identitas dan Hak Atas Tanah

Anugerah Mulia Utami¹, Nurul Uswatun Hasanah²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

Jl. Kamizaun, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke
E-mail: anugerahmuliautami@unmus.ac.id¹, nuruluswatunhasanah@unmus.ac.id²

Abstract : *The National Strategic Project (PSN) food estate in Merauke Regency, South Papua, is a large-scale development policy aimed at strengthening national food security. However, its implementation has generated complex socio-political impacts on local indigenous communities. This study aims to examine the social resilience of indigenous communities in facing the PSN, to analyze identity politics as a basis for resistance, and to explore the conflict between ulayat rights and PSN policies in Merauke. The research method employed is a critical literature review with a qualitative approach, collecting and analyzing various sources such as scientific journals, policy reports, legal documents, and trusted media news. The findings indicate that the Merauke PSN has caused significant pressure on the social resilience of the Marind, Yei Nan, and Muyu indigenous communities through the loss of access to land and traditional livelihood resources. Identity politics emerges as a basis for collective resistance, framing the food estate as a form of neo-colonialism, with indigenous symbols such as the Red Cross serving as markers of rejection against land appropriation without consent. The conflict between ulayat rights and PSN policies reflects the state's failure to recognize and protect indigenous lands, exacerbated by unequal power dynamics at the local level in the form of intimidation, criminalization of indigenous leaders, and the removal of resistance symbols. This study concludes that the Merauke PSN cannot be sustainable without the recognition of ulayat rights and meaningful dialogue with indigenous communities. A temporary suspension of the project, legal protection for indigenous rights defenders, and a comprehensive evaluation of the national PSN policy involving indigenous perspectives and environmental sustainability are urgently required.*

Keywords: *National Strategic Project; Merauke; social resilience; identity politics; ulayat rights; latent conflict.*

Abstrak : Proyek Strategis Nasional (PSN) *food estate* di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, merupakan kebijakan pembangunan berskala besar yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, implementasinya menimbulkan dampak sosial politik yang kompleks bagi masyarakat adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketahanan sosial masyarakat adat dalam menghadapi PSN, menganalisis politik identitas sebagai basis resistensi, serta mengeksplorasi benturan antara hak ulayat dengan kebijakan PSN di Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kritis dengan pendekatan kualitatif, yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dokumen hukum, dan berita media terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSN Merauke telah menyebabkan tekanan signifikan terhadap ketahanan sosial masyarakat adat Marind, Yei Nan, dan Muyu melalui hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya penghidupan tradisional. Politik identitas muncul sebagai basis perlawanan kolektif yang memframing *food estate* sebagai bentuk kolonialisme baru, dengan simbol-simbol adat seperti Salib Merah menjadi penanda penolakan terhadap penguasaan tanah tanpa persetujuan. Benturan hak ulayat dengan kebijakan PSN mencerminkan kegagalan negara dalam mengakui dan melindungi tanah adat, yang diperparah oleh dinamika kekuasaan timpang berupa intimidasi, kriminalisasi tokoh adat, dan pencabutan simbol perlawanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PSN Merauke tidak dapat berkelanjutan tanpa pengakuan atas hak ulayat dan dialog yang bermakna dengan masyarakat adat. Diperlukan penghentian sementara proyek, perlindungan hukum bagi pembela hak adat, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PSN secara nasional dengan melibatkan perspektif masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

Kata kunci: Proyek Strategis Nasional; Merauke; ketahanan sosial; politik identitas; hak ulayat; konflik laten.

1. PENDAHULUAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, merupakan manifestasi ambisi negara dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Pemerintah mengidentifikasi Merauke sebagai kawasan potensial untuk

pengembangan lumbung pangan terpadu, yang kemudian dikenal sebagai *food estate*, dengan luas lahan yang mencapai ratusan ribu hektar (Pecamuya, 2025). Program ini digadang-gadang sebagai solusi atas kerentanan Indonesia terhadap krisis pangan global sekaligus sebagai landasan bagi kemerdekaan bangsa yang sejati (CNN Indonesia, 2026). Namun, di balik narasi besar ketahanan pangan, implementasi PSN di Merauke justru membuka ruang konflik sosial politik yang kompleks, terutama yang menyangkut ketahanan sosial masyarakat adat serta ketegangan laten seputar politik identitas dan hak atas tanah.

Secara politik, kebijakan PSN di Merauke mencerminkan pendekatan pembangunan yang sangat terpusat (*top down*). Pemerintah pusat, melalui kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan pihak swasta seperti Jhonlin Group, mengendalikan penuh arah dan eksekusi proyek ini (CNN Indonesia, 2026). Di tingkat lokal, kebijakan ini seringkali tidak mempertimbangkan peran masyarakat adat sebagai subjek sentral, melainkan hanya sebagai objek pembangunan. Akibatnya, muncul ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban proyek. Masyarakat adat Marind, Yei Nan, dan Muyu, sebagai pemilik hak ulayat historis, merasakan ancaman eksistensial akibat alih fungsi lahan secara masif yang membatasi ruang gerak tradisional dan merusak sistem penghidupan mereka (Greenpeace Indonesia, 2025). Hal ini memicu resistensi, di mana wacana lingkungan dan hak adat dijadikan sebagai politik tandingan (*counter hegemonic*) untuk melawan narasi pembangunan negara (Rikardus, 2025).

Dari aspek sosial, PSN Merauke memunculkan fenomena kerentanan sosial yang paradoks. Di satu sisi, pemerintah menjanjikan kemajuan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara serta penyerapan tenaga kerja melalui Brigade Pangan (Purnama et al., 2025). Sebagian masyarakat, yang tergabung dalam 22 marga di Distrik Anim Ha, Jagebob, dan Sota, bahkan menyatakan dukungan mereka terhadap PSN karena dianggap membawa kemajuan bagi anak cucu (Suara Merauke, 2025). Namun di sisi lain, bagi banyak masyarakat adat lainnya, terutama mereka yang memegang teguh nilai tradisional, *food estate* dipersepsikan sebagai bentuk kolonialisme baru. Seorang perempuan Marind bernama Rafaela menggambarkan bahwa “makanan hutan memiliki rasa kebebasan,” yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan bagi mereka tidak dapat dipisahkan dari kebebasan bergerak di atas tanah leluhur (Greenpeace Indonesia, 2025). Kerawanan pangan justru muncul karena proyek ini membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam hayati (Sianipar & Nurish, 2021).

Konflik laten dalam pelaksanaan PSN di Merauke terutama dipicu oleh benturan antara klaim negara atas tanah untuk kepentingan nasional dengan hak ulayat masyarakat adat. Negara seringkali memandang tanah di Merauke sebagai *terra nullius* atau tanah kosong yang belum

dimanfaatkan secara optimal, padahal tanah tersebut memiliki ikatan spiritual dan kultural yang kuat dengan masyarakat adat. Penelitian Sama (2025) menunjukkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menggarap sekitar 2 juta hektar tanah di Merauke memiliki implikasi hukum, sosial, dan eksistensial yang serius terhadap hak ulayat. Selain itu, politik identitas turut memperkuat resistensi. Pengalaman historis kekerasan militer di Papua membuat kehadiran Komando Daerah Militer baru dengan ribuan personel di Merauke menjadi teror tersendiri bagi warga lokal (Rahutomo et al., 2023). Hal ini mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial dan kriminalisasi terhadap aktivis serta tokoh adat yang menolak proyek.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika ketahanan sosial dan konflik laten dalam pelaksanaan PSN di Merauke, dengan menggunakan perspektif politik identitas dan hak atas tanah. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi celah antara kebijakan pembangunan nasional dengan realitas sosial politik di tingkat lokal. Dengan memahami akar konflik dan resistensi masyarakat adat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat adat di Papua.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kritis yang berfokus pada pengkajian kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke dari perspektif sosial politik, khususnya ketahanan sosial, konflik laten, politik identitas, dan hak atas tanah. Metode studi literatur kritis dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, serta menganalisis secara mendalam berbagai sumber yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, artikel berita terpercaya, dan dokumen resmi pemerintah. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk memahami secara kontekstual dinamika sosial politik yang berkembang di Merauke, termasuk resistensi masyarakat adat, respons pemerintah, serta implikasi kebijakan terhadap hak ulayat dan stabilitas sosial di tingkat lokal.

Dalam penelitian ini, sumber sumber yang digunakan dikaji secara sistematis untuk melihat relevansi, keabsahan, dan keterkaitan antar fenomena. Untuk memastikan keakuratan dan validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu proses membandingkan berbagai sumber informasi yang berbeda guna memperoleh kesimpulan yang lebih objektif dan mendalam. Dengan membandingkan perspektif dari dokumen pemerintah, laporan lembaga swadaya masyarakat, hasil penelitian akademik, dan pemberitaan media, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap ketegangan antara narasi pembangunan

nasional dengan realitas sosial politik masyarakat adat di Merauke, serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai akar konflik laten dalam pelaksanaan PSN.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke

Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk membangun kawasan lumbung pangan dan energi terpadu (*food estate*) yang berlokasi di Papua Selatan. Kawasan ini secara resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Target luasan lahan yang akan dikembangkan mencapai satu juta hektare, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur pertanian terbesar dalam sejarah Indonesia (Pecamuya, 2025).

Lokasi utama proyek ini berada di kawasan Wanam, Distrik Ilwayab, serta meluas hingga Distrik Tanah Miring, Okaba, dan sekitarnya. Pemerintah mengintegrasikan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk dermaga *multipurpose*, gudang serbaguna (*warehouse*), tangki bahan bakar berkapasitas 5.000 meter kubik, serta jalan akses sepanjang 135 kilometer yang menghubungkan Wanam dengan pusat Kota Merauke (Sianipar & Nurish, 2021). Hingga awal tahun 2026, pembangunan jalan telah mencapai 58,44 kilometer dengan 11,53 kilometer di antaranya telah diperkeras. Kawasan ini dirancang untuk menghasilkan pangan strategis seperti padi dan tebu, dengan pemerintah menargetkan produktivitas padi mencapai 6-7 ton per hektare dan indeks tanam 2-3 kali setahun.

Pelaksanaan PSN Merauke melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan sektor swasta. Lima kementerian utama yang terlibat adalah Kementerian Pertahanan yang bertugas menyediakan dukungan pengamanan, Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur, Kementerian Pertanian untuk pengelolaan lahan dan pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sementara itu, pengerjaan teknis di lapangan dipercayakan kepada PT Jhonlin Group milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) sebagai mitra utama pemerintah (CNN Indonesia, 2026). Selain itu, terdapat konsorsium sepuluh perusahaan yang dikelola dalam lima klaster untuk pengembangan perkebunan tebu seluas 560.000 hektare. Pemerintah menargetkan penyelesaian seluruh infrastruktur utama pada pertengahan tahun 2026.

2. Ketahanan Sosial Masyarakat Adat Menghadapi PSN

Ketahanan sosial masyarakat adat di Kabupaten Merauke menghadapi tekanan signifikan sejak dimulainya Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate. Program yang dibingkai sebagai solusi ketahanan pangan nasional ini justru memunculkan segudang persoalan baru bagi masyarakat adat Marind, Yei Nan, Muyu, dan Kimahima yang mendiami wilayah tersebut. Berdasarkan dokumentasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, terdapat 38 perusahaan dengan berbagai komoditi seperti kelapa sawit, tebu, dan jagung yang menguasai lahan skala luas mencapai 1.588.651 hektar di wilayah adat Merauke (Greenpeace Indonesia, 2025; Rahutomo et al., 2023). Praktik ini mengakibatkan masyarakat adat tereksklusi dan kehilangan kontrol atas tanah dan hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Dampak sosial yang paling dirasakan adalah sulitnya akses atas sumber pangan dan mata pencaharian tradisional. Masyarakat adat di Merauke memiliki budaya pangan semi berburu dan meramu yang bergantung pada komoditas ekosistem hutan seperti sagu dan hewan buruan. Namun, setelah hutan dibabat dan diubah menjadi perkebunan tebu serta sawah, mereka kehilangan dapur alam mereka. Seorang perempuan adat Marind bernama Rafaela menggambarkan bahwa "makanan hutan memiliki rasa kebebasan," yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan bagi masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari kebebasan bergerak di atas tanah leluhur.

Penelitian Ahmad Arif di empat kampung di Merauke menunjukkan bahwa data gizi dan kesehatan masyarakat adat sangat buruk setelah adanya program food estate. Masyarakat lokal yang terbiasa berburu hewan kini terpaksa menukarkan hasil buruan dengan beras dan mi instan yang kualitasnya lebih buruk. "Dia harus menghabiskan seluruh sumber dayanya hanya untuk membeli pangan yang kualitasnya sebenarnya lebih buruk dari yang mereka makan sebelumnya," ungkap Aik, yang menyebut fenomena ini sebagai gastrokolonialisme, yaitu penjajahan terhadap perut yang membuat masyarakat tergantung pada makanan baru yang tidak lebih baik kualitasnya (Greenpeace Indonesia, 2025). Angka kematian anak dan bayi cenderung meningkat di daerah-daerah yang dihuni masyarakat lokal terdampak PSN.

Di sisi lain, terdapat dualisme respons dalam masyarakat adat terhadap PSN. Sebagian warga Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, telah bekerja di proyek tersebut. Kepala Kampung Wanam, Kosmas Serilius, menyatakan bahwa dari 743 jiwa penduduk, sebagian sudah bekerja di proyek dan memperoleh penghasilan bulanan yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu warga bernama Paul Tinus (29) mengaku sebelumnya bekerja sebagai pelaut yang harus meninggalkan keluarga dalam waktu lama, namun kini dapat tetap dekat rumah sambil mencari nafkah. Ketua PMKRI Cabang Merauke, Kristianus Samkakai,

menegaskan bahwa masyarakat tidak anti-pembangunan, tetapi mengharapkan agar pembangunan dilakukan melalui proses dialog yang melibatkan pemilik hak ulayat. PMKRI dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sepakat bersama-sama mengawal aspirasi masyarakat adat agar pemerintah pusat membuka ruang dialog. Namun, bagi sebagian besar masyarakat adat lainnya, food estate dipersepsikan sebagai bentuk kolonialisme baru yang mengambil sumber daya dan ruang hidup untuk kemajuan nasional, bukan upaya pembangunan yang berpihak pada mereka

3. Politik Identitas sebagai Basis Resistensi terhadap PSN

Politik identitas menjadi salah satu faktor kunci yang memperkuat resistensi masyarakat adat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke. Bagi masyarakat adat Marind, Yei Nan, dan Muyu, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan fondasi identitas budaya dan eksistensi mereka sebagai komunitas adat. Suku Malind Anim, yang merupakan populasi terbesar di Merauke, masih mempertahankan sistem klan atau marga yang berpusat pada sistem kepercayaan yang disebut sebagai Dema, yaitu roh leluhur yang menempati hutan, sungai, dan rawa sebagai tempat sakral untuk ritual adat. Ancaman terhadap tanah ulayat oleh karena itu dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan identitas kultural mereka.

Dalam konteks ini, resistensi terhadap PSN tidak dapat dipahami semata sebagai gerakan ekonomi atau lingkungan, melainkan sebagai perjuangan eksistensial untuk mempertahankan jati diri. Wacana lingkungan di Merauke telah menjadi arena politik yang melawan hegemoni proyek negara sebagai ancaman kehidupan. Melalui pendekatan yang disebut sebagai *counter-hegemonic discourse*, masyarakat adat dan aktivis lingkungan berhasil memframing *food estate* sebagai "kolonialisme baru" yang mengambil sumber daya dan ruang hidup untuk kemajuan nasional, bukan upaya pembangunan yang berpihak pada mereka. *Framing* ini efektif karena menyentuh nilai-nilai mendasar tentang kedaulatan dan martabat budaya.

Simbol-simbol identitas juga memainkan peran penting dalam mengartikulasikan resistensi. Masyarakat adat marga Kamuyen, misalnya, memasang simbol "Salib Merah" sebagai tanda larangan terhadap aktivitas perusahaan yang menyerobot hutan adat mereka. Simbol tersebut bukan sekadar penanda fisik, melainkan representasi kolektif dari penolakan terhadap penguasaan tanah tanpa persetujuan pemilik ulayat. Ketika simbol tersebut dicabut oleh pihak tak dikenal pada Maret 2026, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Merauke mengecam tindakan tersebut sebagai upaya melemahkan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat mereka. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana identitas kultural menjadi sasaran dalam konflik agraria yang lebih luas.

Politik identitas di Merauke berhasil membangun rantai ekuivalensi yang menghubungkan berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda, seperti aktivis lingkungan, akademisi, LSM, jurnalis, dan komunitas adat, dalam tujuan ideologis yang sama untuk menentang ketidakadilan ekologis dan sosial. Slogan seperti "Papua bukan tanah kosong" menjadi pernyataan politik yang menegaskan bahwa tanah Papua dihuni oleh masyarakat dengan sistem hukum adat dan identitas budaya yang kuat, sehingga tidak dapat begitu saja diklaim untuk kepentingan nasional tanpa persetujuan mereka. Dengan demikian, politik identitas tidak hanya menjadi basis mobilisasi kolektif, tetapi juga instrumen kritis untuk menantang legitimasi narasi pembangunan negara yang eksklusif.

4. Hak atas Tanah (Hak Ulayat) dalam Benturan dengan Kebijakan PSN

Benturan paling fundamental antara Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dengan masyarakat adat terletak pada sengketa hak ulayat. Bagi masyarakat adat Marind, Yei Nan, Muyu, dan Makleuw, tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan fondasi identitas, sumber kehidupan, dan ruang sakral yang terhubung dengan leluhur. Proyek food estate yang menggarap sekitar dua juta hektar tanah di Merauke telah menimbulkan implikasi hukum, sosial, budaya, dan eksistensial yang serius terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Di sisi lain, pemerintah berdalih bahwa PSN Merauke merupakan upaya untuk menyejahterakan rakyat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang menghadirkan paradigma baru pembangunan nasional, yang memberi kewenangan khusus kepada pemerintah untuk mempercepat infrastruktur. Namun, para pemohon yang terdiri dari YLBHI, WALHI, dan 19 organisasi lainnya menggugat ketentuan PSN dalam UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap menggerus prinsip negara hukum dan menimbulkan konflik sosial-ekonomi yang melanggar hak konstitusional warga negara.

Dalam praktiknya, pelaksanaan PSN di Merauke berlangsung tanpa dialog dengan masyarakat adat. Liborius Kodai Moiwend, Kepala Marga Moiwend dari Kampung Wogekel, menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi dan menyatakan bahwa "pertama kali PSN masuk tidak pernah duduk dengan tuan dusun. Mereka masuk seperti pencuri". Sebanyak 300 unit ekskavator didatangkan pada Agustus 2024 melalui pelabuhan milik perusahaan perikanan, dan pembongkaran hutan dikawal oleh aparat TNI. Masyarakat adat yang melakukan protes pemalangan diabaikan, dan simbol "Salib Merah" yang mereka pasang sebagai tanda penolakan bahkan dicabut.

Lima warga adat Marind menggugat izin lingkungan untuk jalan akses sepanjang 135 kilometer yang mendukung PSN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Maret 2026.

Mereka datang ke pengadilan dengan pakaian adat dan melaksanakan upacara ritual dengan mengoleskan lumpur putih di tubuh sebagai tanda berkabung atas kehancuran tanah adat . Sinta Gebze, salah satu penggugat, menyatakan: "Kami mengajukan gugatan karena kami berduka. Kami kehilangan tanah kami, ibu kami, tempat kami mencari makanan. Investor masuk tanpa izin, seperti pencuri, dan merobek hutan dengan ekskavator" .

Sementara itu, Komisi XIII DPR RI mendesak pemerintah menghentikan sementara aktivitas PSN Kebun Tebu di Merauke sampai ada kepastian perlindungan hak masyarakat adat Yei . Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira menegaskan: "Tanah adat bukan komoditas, tapi identitas dan sumber hidup masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan intimidasi dan perampasan berkedok pembangunan" . Pemerintah kini menghadapi tuntutan untuk mengakui hak ulayat dan menerapkan proses dialog yang bermakna dengan masyarakat adat sebagai syarat mutlak bagi kelanjutan proyek

5. Konflik Laten dan Dinamika Kekuasaan di Tingkat Lokal

Sistem bilangan Veda tidak hanya terbatas pada perhitungan aritmatika, tetapi juga memiliki aplikasi dalam berbagai bidang ilmu, termasuk astronomi dan geometri. Beberapa kontribusi penting meliputi:

Konflik laten dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke tercermin dari ketegangan struktural antara masyarakat adat dengan aparat keamanan serta pihak perusahaan. Liborius Kodai Moiwend, Ketua Marga Moiwend dari Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab, menyatakan bahwa proyek ini berlangsung tanpa dialog dengan masyarakat adat. "Pertama kali PSN masuk tidak pernah duduk dengan tuan dusun. Mereka masuk seperti pencuri," ungkapnya di Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan, sekitar 300 unit ekskavator didatangkan pada Agustus 2024 dan pembongkaran hutan justru dikawal oleh aparat TNI. "Masyarakat kami tidak bisa berbuat apa-apa, rawa hutan semua dihancurkan oleh PSN ini," tegasnya . Kehadiran Komando Daerah Militer baru dengan ribuan personel di Merauke turut memperkuat ketakutan masyarakat adat mengingat pengalaman historis kekerasan militer di Papua.

Dinamika kekuasaan yang timpang juga melahirkan intimidasi dan kriminalisasi terhadap tokoh adat yang menolak PSN. Vincen Kwipalo dari marga Kwipalo, Suku Yei, dilaporkan ke polisi oleh PT Murni Nusantara Mandiri setelah ia menghentikan aktivitas pembongkaran hutan di wilayah adatnya. Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mengecam langkah ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap pembela hak adat . Rumah Vincen juga diserang empat orang tak dikenal pada Oktober 2025 dengan senjata panah dan kapak, yang

diduga berasal dari marga Blojei yang telah melepas tanah ulayat kepada perusahaan. Vincen menyatakan, "Kami diadu oleh perusahaan" .

Bentuk konflik laten lainnya adalah pencabutan simbol perlawanan adat. Simbol "Salib Merah" milik marga Kamuyen di Kampung Nakias yang dipasang sebagai tanda larangan terhadap aktivitas perusahaan dicabut pihak tak dikenal pada Maret 2026. Direktur LBH Papua Merauke, Teddy Wakum, menyatakan bahwa tindakan ini disengaja untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat mempertahankan tanah ulayat mereka. Sebelumnya, keluarga ketua marga Kamuyen juga mengalami intimidasi berupa pembakaran rumah singgah dan serangan bersenjata oleh sekelompok orang . LBH Papua mendesak kepolisian dan pemerintah daerah segera turun tangan guna mencegah konflik sosial yang lebih luas di wilayah tersebut.

6. Perbandingan dengan Kebijakan PSN di Daerah Lain

Matematika Veda telah memberikan kontribusi besar terhadap sistem angka global, terutama melalui pengaruhnya pada matematika Arab dan Eropa.

Pengalaman pelaksanaan Program Food Estate di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan pola kegagalan dan tantangan yang berulang, sehingga dapat menjadi pelajaran berharga bagi pelaksanaan PSN di Merauke. Di Kalimantan Tengah, program Food Estate yang diluncurkan pada era pemerintahan sebelumnya menghadapi tantangan serius terkait kesuburan tanah dan infrastruktur. Kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi food estate sebagian besar berada di lahan gambut, yang memerlukan perlakuan khusus dan menghadapi ancaman penurunan muka air secara signifikan . Minimnya infrastruktur dasar serta belum adanya pengalaman serupa di masa lalu menyebabkan program ini berjalan tanpa perencanaan yang matang .

Di Sumatera Utara, program Food Estate di Humbang Hasundutan mengalami kegagalan total. Berdasarkan studi dari *Community Initiative Study and Development Group*, sekitar 90 persen dari 215 hektar lahan percontohan food estate di Desa Ria-Ria telah ditinggalkan dan ditumbuhi semak belukar (Pardede et al., 2022). Petani lokal yang sebelumnya menanam padi, kopi, andaliman, serta menyadap kemenyan dipaksa beralih menanam bawang merah, bawang putih, dan kentang di luar keahlian mereka. Hasilnya sangat mengecewakan: terdapat petani yang menanam empat ton bibit hanya mampu memanen dua ton.

Memperhatikan pengalaman di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, pelaksanaan PSN di Merauke menunjukkan pola kesalahan yang sama: pendekatan *top-down* tanpa melibatkan masyarakat adat, konversi lahan tanpa kajian ekologis yang memadai, serta dominasi kepentingan korporasi besar seperti Jhonlin Group yang menguasai ribuan hektar tanah . Di Merauke, sekitar 1,6 juta hektare tanah adat terancam dikonversi menjadi sawah dan

perkebunan tebu . Sementara itu, pemerintah justru memperluas program ini ke berbagai daerah lain tanpa mengevaluasi kegagalan sebelumnya. Di Sumatera Utara, pemerintah mengalokasikan 34.000 hektare hutan di Pakpak Barat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah untuk perluasan proyek *food estate* seluas 15.000 hektare (Rasman et al., 2023). Pola ini menunjukkan bahwa *food estate* bukanlah kebijakan yang berbasis pembelajaran, melainkan proyek ideologis yang dipaksakan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke dari perspektif sosial politik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah menimbulkan ketegangan yang signifikan antara kepentingan pembangunan nasional dengan hak-hak dasar masyarakat adat. Ketahanan sosial masyarakat adat Marind, Yei Nan, dan Muyu mengalami tekanan berat akibat hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya penghidupan tradisional, sementara politik identitas menjadi basis perlawanan kolektif yang memperkuat resistensi terhadap proyek yang dipersepsikan sebagai bentuk kolonialisme baru. Benturan hak ulayat dengan kebijakan PSN mencerminkan kegagalan negara dalam mengakui dan melindungi tanah adat, yang diperparah oleh dinamika kekuasaan timpang di tingkat lokal berupa intimidasi, kriminalisasi, dan pencabutan simbol-simbol perlawanan adat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus menghentikan sementara seluruh aktivitas fisik PSN di Merauke serta membuka dialog yang inklusif, transparan, dan bermakna dengan masyarakat adat Marind, Yei Nan, dan Muyu sebagai pemilik hak ulayat, sebelum proyek dilanjutkan. Kedua, negara wajib mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, dengan melakukan pemetaan partisipatif dan pengembalian tanah adat yang telah dikonversi tanpa persetujuan. Ketiga, aparat penegak hukum harus menghentikan praktik kriminalisasi terhadap tokoh adat dan aktivis yang membela hak-hak masyarakat, serta memproses secara adil laporan-laporan intimidasi dan kekerasan yang dialami warga. Keempat, pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan PSN di seluruh Indonesia dengan melibatkan para ahli ekologi, antropologi, dan hukum adat, serta menjadikan pengalaman gagal di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara sebagai pelajaran untuk tidak mengulangi pola kesalahan yang sama di Merauke. Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan etnografi yang mendalam guna menangkap secara lebih utuh suara dan pengalaman langsung masyarakat adat

yang terdampak PSN, serta mengkaji efektivitas mekanisme ganti rugi dan restitusi yang selama ini tidak berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2026). *Mentan Sebut Food Estate Merauke Bakal Jadi Motor Ketahanan Pangan*. [Www.Cnnindonesia.Com](http://www.cnnindonesia.com).
- Greenpeace Indonesia. (2025). *Kenyataan Pahit di Balik Janji Manis PSN Tebu Merauke*. [Www.Greenpeaceindonesia.Org](http://www.greenpeace.org/indonesia). <https://www.greenpeace.org/indonesia>
- Pardede, P. D. K., Indainanto, Y. I., Nasution, F. A., Saraan, M. I. K., & Nasution, L. N. (2022). Mencermati Perkembangan Food Estate Di Kabupaten Humbang Hasundutan Universitas Semarang , Indonesia Universitas Sumatera Utara , Indonesia Upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui program food estate di Sumatera Utara dinilai menjadi solusi tepat dalam. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan*, 1(2), 23–29. <https://doi.org/10.32734/jkakup.v1i2.9834>
- Pecamuya, R. (2025). Dampak Kebijakan Lumbung Pangan Nasional terhadap Ketahanan Pangan Lokal: Perspektif Masyarakat Adat Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 74–80. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.374>
- Purnama, E. N., Lekatompessy, R. L., Pardamean, D., & Kontu, F. (2025). Program Food Estate di Kabupaten Merauke, Solusi atau Delusi Kebijakan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 14(1), 156–164.
- Rahutomo, A. B., Alexander, M. I., Yustika, M., & Nurzirwa, R. Y. (2023). Tinjauan Kebijakan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. *JBKL*, 1(1), 31–55.
- Rasman, A., Theresia, E. S., & Aginda, M. F. (2023). Analisis Implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia. *HJTAS*, 1(1), 36–68.
- Rikardus, E. (2025). Ketahanan Pangan dan Hak Akses Lahan bagi Masyarakat Adat di Merauke : Kajian Kritis atas Implementasi Kebijakan Publik. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 81–88.
- Sama, A. H. (2025). Komitmen Hukum Nasional atas Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Merauke terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Nusa Putra*, 1–10.
- Sianipar, B., & Nurish, A. (2021). Merauke “Food Estate” : Alternatif Penanganan Konflik di Papua dalam Perspektif Ekonomi-Sosial dan Budaya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(2), 356–374.
- Suara Merauke. (2025). *Puluhan Masyarakat Pemilik Ulayat Tiga Distrik di Merauke Nyatakan Sikap Dukung PSN*. *Suara Merauke*. Suaramerauke.Go.Id. <https://suara.merauke.go.id>